



USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**MODEL KERJASAMA MUTUALISME ANTARA PIHAK TERDIDIK DAN
PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA
PENGANGGURAN DAN PENGEMBANGAN UKM**

**BIDANG KEGIATAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA GAGASAN TERTULIS**

Diusulkan Oleh :

Ketua	: Nur Hutami Budiarti	(H34080076 – 2008)
Anggota	: Genadi Nur Susilohadi	(F34080015 – 2008)
	Dian Sulistyaningsih	(H24100149 – 2010)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KOTA BOGOR
2011PENGESAHAN**

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

1. Judul Kegiatan : *Model Kerjasama Mutualisme* Antara Pihak Terdidik dan Pelaku Usaha Sebagai Upaya Menekan Angka Pengangguran dan Pengembangan UKM
2. Bidang Kegiatan : () PKM-AI (✓) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
- a. Nama Lengkap : Nur Hutami Budiarti
- b. NIM : H34080076
- c. Jurusan : Agribisnis
- d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor

Menyetujui,
Ketua Departemen

(Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS.)
NIP. 19580908 198403 1 002

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS.)
NIP. 19581228 198503 1 003

Bogor, 4 Maret 2011
Ketua Pelaksana Kegiatan

Nur Hutami Budiarti
NIM. H34080076

Dosen Pendamping

(Suprehatin, SP, MAB)
NIP. 19800107 200501 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat, dan ridho-Nya sehingga dapat terselesaikannya sebuah karya tulis sebagai persyaratan pengajuan Mahasiswa Berprestasi Departemen Agribisnis yang berjudul “Kerjasama Mutualisme Antara Pihak Terdidik dan Pelaku Usaha Sebagai Upaya Menekan Angka Pengangguran dan Pengembangan UKM” dengan lancar.

Pentingnya menumbuhkembangkan kewirausahaan dalam perguruan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang disebabkan oleh banyaknya pencari kerja dan sedikitnya pencipta kerja menjadikan dasar dari latar belakang yang sangat jelas dalam penulisan karya tulis ini. Sebuah usaha untuk menuliskan ide-ide kreatif terhadap permasalahan yang terjadi di bangsa ini dengan memaparkan fakta-fakta yang ada, serta menawarkan solusi atas permasalahan tersebut.

Mengingat keterbatasan yang ada, saya menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik terhadap penulisan karya tulis ini untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Saya pun berharap gagasan tertulis ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

Bogor, 4 Maret 2011

Nur Hutami Budiarti

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	v
Ringkasan	vi
Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan.....	3
Manfaat.....	3
Gagasan.....	3
Kesimpulan.....	9
Daftar Pustaka	10
Daftar Riwayat Hidup	vii
Biodata Dosen Pendamping	viii

DAFTAR GAMBAR

Grafik Proporsi Pengangguran Terdidik Terhadap Total Pengangguran	4
Bagan Kerjasama Mutualisme Antara Pihak Terdidik dan Pihak Pelaku UKM ..	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengangguran Nasional 2005-2010	4
Tabel 2. Data Jumlah Pekerja UKM	5
Tabel 3. Profil UKM Indonesia	6

RINGKASAN

Karya tulis yang berjudul “Kerjasama Mutualisme Antara Pihak Terdidik dan Pelaku Usaha Dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran dan Pengembangan UKM” ini dilatar belakangi oleh permasalahan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu tingginya angka pengangguran, khususnya pengangguran terdidik yang proporsinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Sehingga diperlukan upaya pengembangan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat Indonesia. Di lain sisi, usaha kecil menengah (UKM) merupakan sektor usaha yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, melihat perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan solusi cara menekan angka pengangguran di Indonesia, memberikan solusi menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi sektor UKM, memberikan solusi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis keunggulan lokal melalui kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan pelaku UKM.

Sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda perlu adanya pembelajaran berbasis kurikulum kewirausahaan. Berbagai pelatihan kewirausahaan juga mutlak diperlukan. Sektor usaha kecil dan menengah yang bersifat padat karya sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya menekan angka pengangguran. Kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan pelaku usaha merupakan solusi strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui kerjasama ini pihak terdidik mendapatkan kesempatan untuk belajar praktik bisnis secara langsung. Sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa dan semangat kewirausahaan di dalam diri mereka dan mereka tidak lagi berorientasi untuk mencari kerja tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Sebaliknya para pelaku UKM juga mendapatkan kesempatan untuk belajar berbagai teori bisnis yang mereka butuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Kerjasama mutualisme ini merupakan cikal bakal terbentuknya asosiasi pelajar – pengusaha.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari aspek sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Wilayah yang luas serta kondisi alam yang subur memberikan hasil alam yang berlimpah ruah yang merupakan faktor produksi penting bagi industri-industri dan merupakan sumber utama pendapatan nasional Indonesia.

Indonesia juga memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang sangat besar. Menurut George 2004, jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke empat terbanyak di dunia setelah Cina, Rusia, dan India. Berdasarkan data BPS Nasional, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 237,556,363 jiwa (bps.go.id). Hal ini merupakan potensi besar dalam hal SDM yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun tingginya potensi SDM ini malah menimbulkan permasalahan krusial bagi bangsa Indonesia, yaitu tingginya angka pengangguran. Mengutip data survei tenaga kerja nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Indonesia mengungkapkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta orang atau sekitar 22,2 persen adalah pengangguran. Berdasarkan hasil survey BPS Republik Indonesia tahun 2010, jumlah pengangguran Indonesia mencapai angka 8,6 juta jiwa.

Tidak hanya pengangguran yang disebabkan karena kurangnya pendidikan, namun alumni berbagai sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi pun banyak yang menganggur, yang lazim disebut dengan “pengangguran terdidik”. Hal yang mengesankan adalah tingginya proporsi angka pengangguran terdidik di Indonesia dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada Februari 2010 terdapat kurang lebih sebanyak 4,8 juta orang pengangguran terdidik yang merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, dari total 8,6 juta pengangguran di Indonesia. Hal ini berarti 55,9 persen jumlah pengangguran pada tahun 2010 merupakan pengangguran terdidik. Ini membuktikan bahwa tingginya pendidikan tidak menjadi jaminan terhadap seseorang untuk bisa langsung bekerja.

Tingginya angka pengangguran menyebabkan berbagai permasalahan baik ekonomi, social maupun politik. Pengangguran menciptakan angka produktivitas yang rendah, dimana dapat menurunkan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Hal ini juga berpotensi menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun politik. Maka permasalahan mengenai tingginya angka pengangguran ini harus segera diatasi karena merupakan salah satu permasalahan nasional yang sangat krusial dan berdampak sistemik.

Rendahnya daya serap lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia menjadi faktor utama penyebab tingginya angka pengangguran. Terlebih lagi rendahnya jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) di Indonesia sehingga sumber daya yang ada fokus pada kegiatan mencari kerja bukan

menciptakan lapangan kerja. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, menyatakan saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air baru sebanyak 0,24 persen dari total populasi penduduk. Padahal diperlukan setidaknya dua persen jumlah wirausaha dari keseluruhan jumlah penduduk agar suatu negara dapat dikatakan makmur. Maka pendidikan kewirausahaan mutlak diperlukan dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, khususnya bagi para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan pendidikan kewirausahaan ini diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat Indonesia ke arah mindset kewirausahaan. Sehingga mereka tidak lagi berorientasi untuk mencari kerja tetapi menciptakan lapangan pekerjaan seusainya menjalani pendidikan.

Di sisi lain Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia terbukti berhasil menjadi tonggak perekonomian nasional pada masa krisis periode tahun 1997 sampai dengan 2003. Selain itu, UKM pun telah menjadi kelompok usaha penggerak pertumbuhan pasca krisis ekonomi. Hingga tahun 2010, terdapat 51,26 juta UKM di Indonesia dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 2.609 triliun atau hampir seperempat dari total PDB nasional. Pada tahun 2003, UKM yang masih berjumlah 42,40 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 79,03 juta orang. Pencapaian tersebut menyatakan bahwa UKM memiliki peranan besar baik dalam penyerapan tenaga kerja dalam negeri maupun dalam menyumbangkan PDB nasional. Besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja tersebut tentunya dapat dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Melihat kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir, maka UKM merupakan sektor usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Kendati demikian, kondisi UKM tetap rawan karena berbagai permasalahan dan keterbatasan pihak UKM. Berbagai permasalahan yang lazim dihadapi para pelaku UKM misalnya keberpihakan bank yang rendah terhadap UKM (permodalan terbatas), pasar bebas yang mulai dibuka, terbatasnya kebijakan pemerintah yang mendukung sektor usaha kecil, keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan mengakses pasar serta kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi pihak UKM dan masalah ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia, yaitu berupa tingginya angka pengangguran nasional, terutama pengangguran terdidik, maka perlu dibangun kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dengan pihak pelaku UKM. Dimana melalui hubungan kerjasama mutualisme tersebut, pihak terdidik dapat belajar praktik berwirausaha secara langsung, yang diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri mereka. Dan sebaliknya para pelaku UKM berkesempatan untuk dapat belajar berbagai teori bisnis yang berguna bagi mereka dalam melakukan usahanya. Maka baik pihak terdidik maupun UKM memperoleh manfaat dan keuntungan dari hubungan kerjasama mutualisme ini, yang diharapkan ke depannya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak.

Tujuan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah mengenalkan solusi strategis berupa kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan pelaku UKM dalam menghadapi permasalahan berupa tingginya angka pengangguran nasional dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pihak UKM.

Manfaat

Bagi Mahasiswa

1. Menumbuhkan jiwa ilmiah, kreatif, dan inovatif untuk berkarya dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Mengetahui potensi dari hubungan kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan UKM dalam menghadapi permasalahan pengangguran nasional dan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor UKM.

Bagi Perguruan Tinggi

1. Meningkatkan kompetisi dan kualitas ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi serta meningkatkan citra positif perguruan tinggi sebagai salah satu pencetak generasi perubah yang positif bagi bangsa.
2. Mengetahui potensi dari hubungan kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan UKM dalam menghadapi permasalahan pengangguran nasional dan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor UKM.

Bagi Pemerintah dan Masyarakat

1. Mengetahui potensi dari hubungan kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan UKM dalam menghadapi permasalahan pengangguran nasional dan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor UKM yang selanjutnya dapat diimplementasikan.

GAGASAN

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. (www.wikipedia.org)

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tingginya angka pengangguran yang berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan sosial maupun ekonomi.

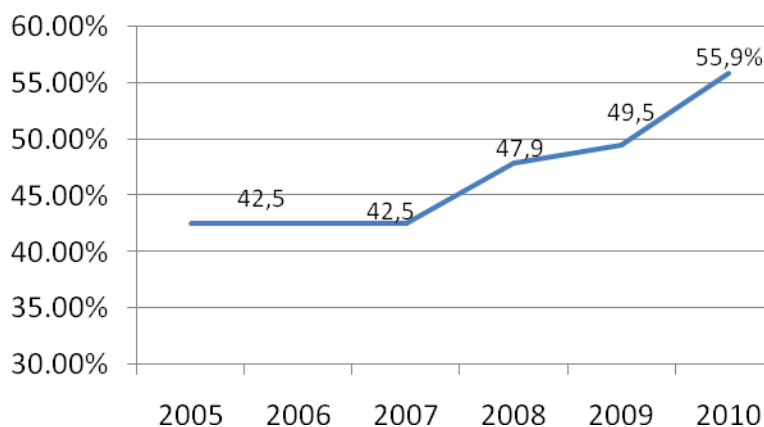
Tabel 1. Data Pengangguran Nasional 2005-2010

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Belum Tamat SD	1 012 711	849 425	666 066	528 195	476,302	606 230
Sekolah Dasar	2 540 977	2 675 459	2 753 548	2 216 748	2,143,747	1 522 465
SLTP	2 680 810	2 860 007	2 643 062	2 166 619	2,054,682	1 657 452
SLTA	3 911 502	4 047 016	3 745 035	3 369 959	3,471,213	3 448 137
Diploma	322 836	297 185	330 316	519 867	486,399	538 186
Universitas	385 418	375 601	409 890	626 202	626,621	820 020
Total	10 854 254	11 104 693	10 547 917	9 427 590	9 258 964	8 592 490

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Seperti dilihat pada tabel di atas bahwa jumlah pengangguran memang cenderung menurun. Tetapi proporsi pengangguran terdidik, yang terdiri dari lulusan sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi, terhadap jumlah keseluruhan pengangguran malah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Grafik 1.

Gambar 1. Grafik Proporsi Pengangguran Terdidik terhadap Total Pengangguran



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010 (diolah)

Terlihat pada Grafik 1. di atas, proporsi pengangguran terdidik mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada tiga tahun terakhir ini. Keadaan yang sungguh menyedihkan, generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa dan menjadi generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan terhadap keadaan bangsa ini, malah menyumbangkan angka besar terhadap tingkat pengangguran nasional. Agar bangsa Indonesia dapat berkembang, maka hal ini perlu segera diatasi.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. (www.wikipedia.org)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor usaha yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sifatnya yang padat karya diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan tenaga kerja di Indonesia, sehingga dapat menekan tingginya angka pengangguran nasional.

Tabel 2. Data Jumlah Pekerja UKM

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
Pertambangan dan Penggalian	248,842	287,657	255,824	253,146	256,959
Industri Pengolahan	2,598,704	2,538,283	2,728,700	2,641,909	2,671,660
Perdagangan Besar dan Eceran	8,650,713	8,450,211	9,232,631	9,228,487	10,485,974
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1,855,149	1,765,050	1,926,668	2,170,291	2,307,423
Perantara Keuangan dan Jasa	1,627,030	1,619,444	1,559,743	1,490,226	1,423,228
Total	14,980,438	14,660,645	15,703,566	15,784,059	17,145,244

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2004

Sektor UKM juga mengalami perkembangan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, dilihat dari jumlah UKM yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. UKM juga mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang

terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat Kinerja UKM dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Besaran PDB yang diciptakan UKM tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari total PDB Nasional). Padahal pada tahun 2000, sumbangan UKM baru mencapai 54,5 persen terhadap total PDB Nasional. Sumbangan pertumbuhan PDB UKM lebih tinggi dibandingkan sumbangan pertumbuhan dari Usaha Besar. Pada tahun 2000 dari 4,9 persen pertumbuhan PDB Nasional secara total, 2,8 persennya berasal dari pertumbuhan UKM. Kemudian, di tahun 2003 dari 4,1 persen pertumbuhan PDB Nasional secara total, 2,4 persen diantaranya berasal dari pertumbuhan UKM.

Jumlah unit usaha UKM pada tahun 2003 adalah 42,4 juta naik 9,5 persen dibanding pada 2000, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UKM pada tahun 2003 tercatat 79,0 juta pekerja yaitu lebih tinggi 8,6 juta pekerja dibanding tahun 2000 dengan 70,4 juta pekerja.

Tabel 3. Profil UKM Indonesia

Indikator	Tahun 2000	Tahun 2003
Jumlah usaha (juta unit)	38,72	42,40
Tenaga kerja (juta orang)	70,40	79,03
Porsi terhadap PDB (%)	54,50	56,70
Porsi terhadap total kredit (%)	44,61	44,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2004 (diolah)

Melihat berbagai perkembangan UKM tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sektor UKM merupakan sektor usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia. Namun banyak faktor yang menjadi pembatas dalam perkembangan UKM. Survey dari BPS mengidentifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UKM berdasarkan prioritasnya, yakni meliputi: (i) kurangnya permodalan, (ii) kesulitan dalam pemasaran, (iii) persaingan usaha yang ketat, (iv) kesulitan bahan baku, (v) kurang teknis produksi dan keahlian, (vi) kurangnya keterampilan manajerial (SDM) dan (vii) kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi. Selain itu, UKM juga membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif seperti adanya kemudahan dalam hal perijinan, perundangan yang memadai dan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah telah berupaya memaksimalkan penggunaan tenaga kerja pada instansi-instansi negara, namun menurut presiden Yudhoyono, sektor itu tidak mungkin bisa menyerap semua pengangguran yang ada. Sehingga penumbuhan jiwa dan semangat kewirausahaan pada masyarakat Indonesia dalam upaya penyerapan tenaga kerja menjadi sangat penting. Berbagai pelatihan dan seminar kewirausahaan telah banyak diadakan, baik di instansi pendidikan maupun umum. Upaya tersebut sangat baik untuk dilakuakn, namun masyarakat tetap tidak dapat merasakan langsung dengan belajar praktik berwirausaha, hanya barbagai teori bisnis dan cerita dari pengalaman

orang lain yang mereka dapatkan. Maka suatu bentuk kerjasama mutualisme antara pihak terdidik, dalam hal ini merupakan pihak yang memiliki permasalahan pengangguran, dan para pelaku UKM merupakan suatu solusi strategis dalam menghadapi permasalahan pengangguran maupun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UKM. Melalui kerjasama mutualisme ini, pihak terdidik mendapatkan kesempatan untuk belajar praktik langsung berwirausaha, khususnya di sektor UKM. Mereka dapat mempelajari dan mengamati secara langsung berbagai proses dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha-usaha kecil dan menengah (UKM), seolah mereka terjun langsung dan ikut mengelola usaha tersebut. Hal ini dapat mengubah mindset para pelajar atau pihak terdidik ke arah mindset kewirausahaan. Sehingga mereka tidak lagi berorientasi untuk mencari kerja tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka juga dapat belajar untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam menjalankan suatu usaha. Sehingga setelah lulus mereka dapat mendirikan usahanya sendiri karena telah memiliki bekal yang cukup mengenai berwirausaha dari pelaksanaan kerjasama mutualisme ini.

Pelaku UKM juga berkesempatan untuk belajar berbagai teori bisnis yang mereka perlukan dalam menjalankan usahanya. Dengan berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh pihak terdidik di perguruan tinggi atau sekolah formal lainnya, diharapkan mereka dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UKM. Sehingga pelaksanaan kerjasama antara pihak terdidik dan pelaku UKM dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan diharapkan melalui kerjasama mutualisme antara kedua belah pihak ini, dapat mengurangi angka pengangguran nasional dan juga mengembangkan sektor UKM.

Pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan perannya ialah:

1. **Pemerintah**

Pelaksanaan kerjasama mutualisme ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. program ini membutuhkan perencanaan dan implementasi yang serius agar mendapatkan hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Pemerintah perlu mensosialisasikan dan memberikan dorongan kepada pihak terdidik maupun pelaku UKM agar keduanya bersedia bersama-sama menjalankan kerjasama mutualisme ini.

2. **Pihak Terdidik**

Pihak terdidik sebagai pihak yang memerlukan pelatihan kewirausahaan dan praktik berwirausaha untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam diri mereka. Selain itu pihak terdidik juga sebagai pihak yang telah menjalankan pendidikan dan telah belajar mengenai berbagai teori dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan suatu usaha perlu mengimplementasikan dan memberikan pengetahuannya tersebut kepada para pelaku UKM agar mereka dapat mengembangkan usahanya.

- a. **Mahasiswa Manajemen**, mereka dapat mengajarkan berbagai pengetahuan tentang manajerial yang mereka miliki kepada para pelaku

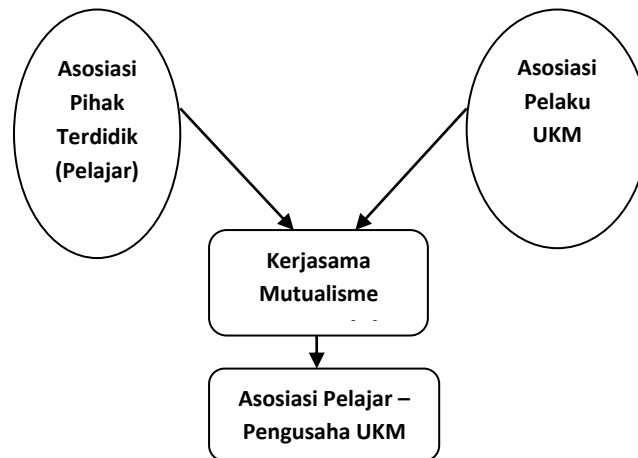
UKM, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan manajerialnya dan dapat *me-manage* usahanya dengan lebih baik.

- b. **Mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi**, mereka dapat memberikan pengetahuannya tentang cara membuat *cashflow* yang baik, sehingga para pelaku UKM dapat membuat *cashflow* usahanya dengan baik dan benar, sebagai salah satu syarat pengajuan kredit pinjaman kepada pihak perbankan.
- c. **Mahasiswa Teknik**, dengan berbagai pengetahuan tentang teknik-teknik produksi terbaru yang mereka miliki, mereka dapat mengajarkan teknik berproduksi secara lebih efisien kepada para pelaku UKM, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar. Merupakan tuntutan pasar untuk dapat meningkatkan efisiensi, terutama saat pintu gerbang perdagangan bebas (CAFTA) telah dibuka seperti sekarang ini.

3. Pelaku UKM

Para pelaku UKM yang bersedia untuk membagi pengalamannya berwirausaha dan juga mengizinkan pihak terdidik (mahasiswa) untuk belajar praktik berwirausaha di lapangan usahanya. Dan juga para pelaku UKM yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya dengan mempelajari berbagai teori bisnis yang mereka butuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam menjalankan usahanya.

Gambar 2. Bagan Kerjasama Mutualisme Antara Pihak Terdidik dan Pelaku UKM



Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan, sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

- a. Sosialisasi bentuk kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan pelaku UKM yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak dan dapat mengatasi permasalahan pengangguran maupun berbagai permasalahan UKM, seperti kurangnya keterampilan manajerial, keterbatasan modal karena tidak dapat memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman ke pihak

- perbankan, serta kurangnya daya saing UKM akibat ketidak mampuan untuk memproduksi secara efisien.
- b. Pembentukan asosiasi pihak terdidik. Terdiri dari berbagai mahasiswa dari beragam jurusan, seperti manajemen, akuntansi, ekonomi dan teknik. Mereka yang ingin belajar praktik berwirausaha dan juga bersedia membagi ilmu pengetahuannya.
 - c. Pembentukan asosiasi pelaku UKM, yang terdiri dari pengusaha-pengusaha UKM yang ingin memajukan usahanya dan juga bersedia membagi pengalamannya dalam berwirausaha.
 - d. Pelaksanaan kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan pelaku UKM. Kerjasama yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak.
 - e. Pembentukan asosiasi pelajar-pengusaha, yang merupakan wadah bagi para pelajar (pihak terdidik) dan pengusaha (pelaku UKM) untuk bersatu dan saling bekerjasama dan maju bersama.

Pelaksanaan kerjasama mutualisme ini harus didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan maupun para pelaku usaha, agar hubungan kerjasama yang terjalin dapat mencapai tujuannya, yaitu menekan angka pengangguran nasional dan mengembangkan sektor UKM.

KESIMPULAN

Kerjasama mutualisme antara pihak terdidik dan pelaku UKM adalah salah satu solusi strategis dalam mengatasi permasalahan Indonesia terkait dengan pengangguran dan pengembangan UKM. Kerjasama yang terjalin diantara pihak terdidik dan pelaku UKM maka kedua pihak tersebut dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran, saling memberi dan menerima yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui kerjasama mutualisme ini pihak terdidik mendapatkan kesempatan untuk mempelajari secara langsung mengenai wirausaha, khususnya di sector usaha kecil dan menengah (UKM). Sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa wirausaha dalam diri pihak terdidik tersebut dan mereka tidak lagi berorientasi untuk mencari kerja tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga setelah lulus mereka dapat mendirikan UKM sendiri. Para pelaku UKM juga mendapatkan kesempatan untuk belajar teori bisnis, mereka dapat mengkonsultasikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi kepada pihak terdidik. Dengan bekal berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama menjalani pendidikan, diharapkan mereka dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UKM, sehingga akan terjalin sebuah hubungan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Pada perkembangan selanjutnya dari hubungan kerjasama ini akan terbentuk asosiasi pelajar-mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Indikator Makro Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah www.bps.go.id/download_file/indikator_makro_ukm.pdf [19 Februari 2011]
- Anonim. 2008. Data Statistik Pengangguran Terbuka Perguruan Tinggi. www.bps.go.id/download_file/data_pengangguran_terbuka.pdf [19 Februari 2011]
- Anonim. 2004. Data Perkembangan Pekerja Usaha Tidak Berbadan Hukum. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=35¬ab=3. [19 Februari 2011]
- Anonim. 2004. Data Perkembangan Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=35¬ab=1 [19 Februari 2011]
- Ariawati, *Ria Ratna*. 2004. *Usaha Kecil dan Kesempatan Kerja*. Fakultas Ekonomi, UNIKOM. Jakarta.
- Dipta, *I. Wayan*. 2004. *Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Iwantono, *Sutrisno*. 2004. *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Jafar Hafsah, *Mohammad*. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Infokap No. 25 tahun XX : hal.40 - 44
- Pangabean, *Riana*. 2004. *Membangun Paradigma Baru Dalam Mengembangkan UKM*. Jakarta.
- Taufiq, *Muhammad*. 2004. *Strategi Pengembangan UKM Pada Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*. Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nur Hutami Budiarti
 Tempat Tanggal lahir : Bogor, 9 Desember 1989
 Karya Ilmiah :
 - a. Analisis Faktor-faktor Harga Beras Dalam Upaya Menekan Harga Beras Nasional
 - b. Perintisan Usahatani Beras Organik di Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor
 - c. Transformasi Komunikasi Aktif Untuk Mewujudkan Kemandirian Usaha Pelestarian Budaya Sunda di Kampung Budaya Sindangbarang Dalam Kancan Wisata Mancanegara
 - d. Mengangkat Kembali Nilai-Nilai Seni Budaya Sunda Sebagai Wujud Kearifan Lokal Pertanian di Kampung Budaya Sindangbarang Melalui Festival Rakyat Tumbuk Lesung Tutunggulan
 Penghargaan Ilmiah :
 - a. Juara Terfavorit penyusunan dan presentasi ilmiah PKM-M pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXIII tahun 2010
 - b. Penghargaan setara Perak dalam perancangan, penyajian poster dan gelar produk PKM-M pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXIII tahun 2010

2. Nama Lengkap : Genadi Nur Susilohadi
 Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 6 Februari 1990
 Karya Ilmiah :
 - a. Transformasi Komunikasi Aktif Untuk Mewujudkan Kemandirian Usaha Pelestarian Budaya Sunda di Kampung Budaya Sindangbarang Dalam Kancan Wisata Mancanegara
 - b. Mengangkat Kembali Nilai-Nilai Seni Budaya Sunda Sebagai Wujud Kearifan Lokal Pertanian di Kampung Budaya Sindangbarang Melalui Festival Rakyat Tumbuk Lesung Tutunggulan
 Penghargaan Ilmiah : -

3. Nama Lengkap : Dian Sulistyaningsih
 Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12 Oktober 1992
 Karya Ilmiah :
 - a. Transformasi Komunikasi Aktif Untuk Mewujudkan Kemandirian Usaha Pelestarian Budaya Sunda di Kampung Budaya Sindangbarang Dalam Kancan Wisata Mancanegara
 Penghargaan Ilmiah : -

Biodata Dosen Pendamping

1. Nama Lengkap dan Gelar : Suprehatin, SP, MAB
2. NIP : 19800107 200501 1 001
3. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
4. Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian Kebijakan Agribisnis
Departemen Agribisnis
5. Fakultas/Departemen : Ekonomi dan Manajemen
6. Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
7. Bidang Keahlian : Value Chain Development, Entrepreneurship